

RAPBD 2020, Tiga BUMD Disuntik Modal Rp40,1 Miliar



Poskota news

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB berencana mengalokasikan anggaran penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda) sebesar Rp40,1 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Dana penyertaan modal itu akan disuntikkan kepada tiga BUMD dan Perusda.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB yang juga Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), H. Zainul Islam merincikan tiga BUMD dan Perusda yang akan mendapatkan suntikan modal.

Pertama, Bank NTB Syariah akan mendapatkan dana penyertaan modal sebesar Rp20 miliar. Kedua, dana penyertaan modal dengan nilai yang sama juga akan diberikan ke PT. Jamkrida NTB Bersaing. Dan ketiga, dana penyertaan modal sebesar Rp100 juta akan diberikan ke PT. Bangun Askrida.

“Kenapa Bank NTB perlu dibiayai. Karena ini bank kita, bank daerah yang semestinya harus kita besarkan. Apalagi sekarang mereka sudah berubah menjadi Bank NTB Syariah. Tentunya memerlukan dukungan di dalam pembiayaan,” terang Zainul, Jumat, 23 Agustus 2019.

Begitu juga PT. Jamkrida NTB Bersaing yang mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp20 miliar. Zainul menjelaskan, PT. Jamkrida NTB Bersaing akan beralih menjadi perusahaan penjaminan syariah. Supaya bisa memberikan penjaminan kepada masyarakat yang meminjam di Bank NTB Syariah.

“Sehingga ini perlu juga kita dukung dari sisi penguatan permodalannya. Agar bisa masuk, berperan dalam membiayai masyarakat NTB yang meminjam di Bank NTB Syariah,” jelasnya.

Sementara itu, penyertaan modal ke PT Bangun Askrida dilakukan Pemprov lantaran selama ini belum pernah menyuntikkan modal. Sedangkan perusahaan ini tetap memberikan kontribusi bagi daerah setiap tahun berupa dividen.

“Karena selama ini Pemda NTB belum pernah memberikan tambahan penyertaan modal. Sehingga tahun 2020, kita akan rencanakan Rp100 juta,” sebutnya.

Persoalan masih minimnya kontribusi BUMD dan Perusda bagi peningkatan PAD sering menjadi sorotan DPRD NTB. Pada 2018, dividen BUMD dan Perusda menurun jika dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan data Biro Ekonomi Setda NTB, pada 2017, target dividen dari BUMD dan Perusda sebesar Rp90,29 miliar, mampu terealisasi sebesar Rp163,84 miliar.

Kemudian pada 2018, dividen BUMD dan Perusda ditargetkan sebesar Rp91,49 miliar. Dari target tersebut hanya terealisasi Rp60,3 miliar. Dengan rincian, target dividen dari PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp60 miliar, terealisasi sebesar Rp49,32 miliar.

Kemudian PT. Gerbang NTB Emas, target dividen sebesar Rp1,1 miliar, terealisasi Rp841 juta. PT. Jamkrida NTB Bersaing, target dividen sebesar Rp692 juta, terealisasi Rp554 juta. PT. Daerah Maju Bersaing dengan target dividen sebesar Rp16 miliar, realisasi nol.

Selanjutnya, PT. Bangun Askrida dengan target dividen sebesar Rp100,6 juta, terealisasi Rp96 juta. PD. BPR NTB Mataram dengan target dividen Rp510,8 juta, terealisasi Rp257,4 juta. PD. BPR NTB Lombok Barat dengan target dividen sebesar Rp2,75 miliar, terealisasi Rp2,37 miliar.

BPR NTB Lombok Tengah dengan target dividen Rp2,384 miliar, terealisasi Rp2,02 miliar. PD. BPR NTB Lombok Timur dengan target sebesar Rp2,15 miliar, realisasi nol. PD. BPR NTB Sumbawa Barat dengan target dividen Rp375 juta, terealisasi Rp432,9 juta.

BPR NTB Sumbawa dengan target Rp2,331 miliar, terealisasi Rp2,252 miliar. PD. BPR NTB Dompu dengan target dividen Rp1,45 miliar, terealisasi Rp1,139 miliar. Terakhir, PD. BPR NTB Bima dengan target dividen sebesar Rp1,645 miliar, terealisasi Rp1,012 miliar. Secara total, target dividen untuk PD. BPR NTB pada 2018 sebesar Rp13,6 miliar hanya mampu terealisasi Rp9,485 miliar.

Pemprov NTB menargetkan setoran dividen semua Perusda dan BUMD tahun 2019 sebesar Rp65,4 miliar lebih. Target ini meningkat dibandingkan capaian dividen BUMD dan Perusda tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp60,3 miliar.

Pada 2019 ini, Pemprov menargetkan dividen dari PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp55 miliar. Kemudian PD. BPR NTB sebesar Rp9,01 miliar, PT. GNE Rp841 juta, PT. Jamkrida NTB Bersaing Rp500 juta dan PT. Bangun Askrida Rp96 juta lebih.

Untuk PD. BPR NTB, dividen berasal dari 8 PD. BPR NTB yang berada di kabupaten/kota. Dengan rincian, PD. BPR NTB Mataram ditargetkan menyeter dividen Rp257 juta, PD. BPR NTB Lombok Barat Rp1,9 miliar.

Kemudian PD. BPR NTB Lombok Tengah Rp2 miliar lebih, PD. BPR NTB Lombok Timur nol, PD. BPR NTB Sumbawa Barat Rp 432 juta, PD. BPR NTB Sumbawa Rp2,25 miliar, PD. BPR NTB Dompu Rp1,1 miliar lebih dan PD. BPR NTB Bima Rp1,01 miliar lebih. (nas)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2019/08/275280/RAPBD.2020,Tiga.BUMD.Disuntik.Modal.Rp40,1.Miliar/>
2. *Suara NTB, RAPBD 2020, Tiga BUMD Disuntik Modal Rp40,1 Miliar, Sabtu, 24 Agustus 2019.*
3. *radarmandalika.net/postur-apbd-manjakan-bumd.*

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.
- Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah:

- Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau mafaat lainnya. Penyertaan

Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

- Investasi Pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, sedangkan tujuan Investasi Pemerintah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.
- Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk:
 - a. Investasi Surat Berharga; dan/atau
 - b. Investasi Langsung.
- Investasi Surat Berharga meliputi:
 - a. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
 - b. investasi dengan cara pembelian surat utang.
- Investasi Langsung meliputi:
 - a. Penyertaan Modal; dan/atau
 - b. Pemberian Pinjaman.
- Investasi Langsung dapat dilakukan dengan cara:
 - a. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau
 - b. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*).

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta:

- Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan

lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

- Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa uang, saham, dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang. Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang/saham. Penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham.
- Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.